

BAB I

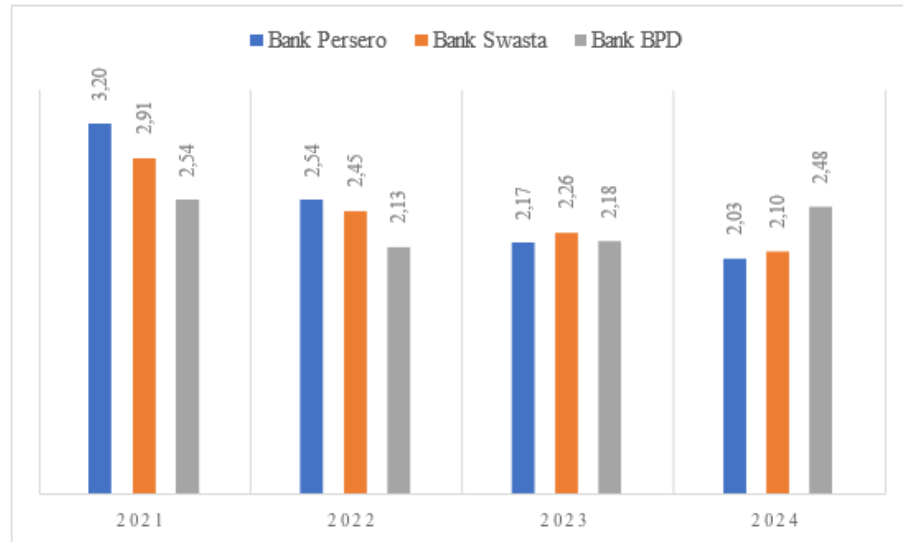
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Risiko kredit merupakan salah satu risiko utama dalam industri perbankan karena secara langsung memengaruhi stabilitas keuangan, kinerja profitabilitas, serta tingkat kepercayaan publik terhadap bank. Risiko kredit yang tercermin dalam rasio non-performing loan (NPL) menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola kualitas aset produktif dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit (OJK, 2017). Dalam konteks perbankan Indonesia, meskipun secara agregat industri perbankan menunjukkan perbaikan kualitas kredit pascapandemi, dinamika risiko kredit tidak berlangsung secara seragam di seluruh kelompok bank.

Berdasarkan data rasio NPL per kelompok bank periode 2021–2024 (Gambar 1), Bank Pembangunan Daerah (BPD) menunjukkan pola yang berbeda dibandingkan bank persero dan bank swasta nasional. Setelah mengalami penurunan NPL pada periode 2021–2022 seiring dengan pemulihan ekonomi dan kebijakan restrukturisasi kredit, NPL BPD kembali meningkat pada tahun 2024, sementara bank persero dan bank swasta justru melanjutkan tren penurunan NPL (OJK, 2024a). Divergensi ini mengindikasikan bahwa risiko kredit BPD bersifat lebih persisten dan tidak sepenuhnya mengikuti siklus perbaikan industri perbankan secara umum. Fenomena tersebut menegaskan bahwa risiko kredit BPD tidak hanya dipengaruhi oleh factor makroekonomi, tetapi juga factor internal bank yang

bersifat struktural.



Gambar 1.1 Non-Performing Loan Bank

Sumber: Laporan Surveillance Perbankan Indonesia (OJK, 2024)

Karakteristik BPD yang memiliki mandat ganda sebagai lembaga bisnis dan agen pembangunan daerah menjadikan bank ini lebih terpapar pada risiko kredit. Portofolio kredit BPD umumnya terkonsentrasi pada sektor-sektor lokal, pembiayaan pemerintah daerah, UMKM, serta segmen konsumtif aparatur sipil negara, yang secara inheren memiliki risiko gagal bayar lebih tinggi dan risiko konsentrasi kredit yang signifikan. Selain itu, perbedaan kapasitas manajemen risiko dan kualitas tata kelola antar-BPD berpotensi memperlebar variasi kualitas kredit di tingkat individual bank.

Literatur empiris menunjukkan bahwa risiko kredit sangat dipengaruhi oleh faktor spesifik bank, seperti pertumbuhan kredit, permodalan, dan profitabilitas (Chaibi & Ftiti, 2015; Jabbouri & Naili, 2019; Maryem Naili & Younes Lahrichi, 2022). Pertumbuhan kredit yang agresif, meskipun mendorong ekspansi bisnis da

pendapatan bunga, sering kali dikaitkan dengan penurunan kualitas kredit apabila tidak diimbangi dengan standar penilaian kredit yang memadai (Akhter, 2023; Barra & Ruggiero, 2023). Beberapa studi menemukan bahwa percepatan pertumbuhan kredit meningkatkan probabilitas terjadinya NPL, khususnya pada bank yang beroperasi di pasar berkembang dengan sistem pengendalian risiko yang relatif lemah (Kharabsheh, 2019; Waemustafa & Sukri, 2015).

Permodalan juga memainkan peran penting dalam menentukan tingkat risiko kredit bank. Modal yang memadai berfungsi sebagai bantalan (*capital buffer*) untuk menyerap potensi kerugian akibat kredit bermasalah dan mendorong bank untuk menerapkan kebijakan penyaluran kredit yang lebih konservatif. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa rasio permodalan yang lebih tinggi berkorelasi negatif dengan risiko kredit (Saleh & Abu Afifa, 2020; Sutanto & Ariefianto, 2024). Namun demikian, hasil empiris lainnya menemukan hubungan yang tidak konsisten, terutama ketika bank dengan modal kuat justru terdorong untuk meningkatkan ekspansi kredit dan mengambil risiko yang lebih besar (Misman & Bhatti, 2020; Maryem Naili & Younès Lahrichi, 2022).

Profitabilitas juga menjadi determinan penting risiko kredit. Bank dengan tingkat profitabilitas yang tinggi umumnya memiliki kualitas aset yang lebih baik, kapasitas manajemen risiko yang lebih kuat, serta kemampuan menyerap kerugian kredit yang lebih besar. Sebaliknya, penurunan profitabilitas dapat mendorong bank untuk mengambil risiko yang lebih tinggi guna mempertahankan tingkat pengembalian, sehingga meningkatkan potensi NPL (Abdelaziz et al., 2022; Mohammad et al., 2024). Studi empiris di berbagai negara menunjukkan adanya

hubungan negatif antara profitabilitas dan risiko kredit, meskipun kekuatan dan arah hubungan tersebut sangat dipengaruhi oleh konteks tata kelola bank (Nikolaidou & Vogiazas, 2017; Sutanto & Ariefianto, 2024).

Dalam perspektif *Agency Theory* (Jensen & Meckling, 1976), mekanisme pengawasan internal memegang peranan krusial dalam membatasi perilaku pengambilan risiko yang berlebihan. Salah satu aspek tata kelola yang semakin mendapat perhatian dalam literatur perbankan adalah keberagaman gender dalam dewan, khususnya keberadaan komisaris wanita. Sejumlah studi menunjukkan bahwa komisaris wanita cenderung memiliki tingkat aversi risiko yang lebih tinggi, pendekatan pengambilan keputusan yang lebih hati-hati, serta sensitivitas yang lebih besar terhadap isu etika dan keberlanjutan (Abou-El-Sood, 2019; Birindelli et al., 2020). Dalam konteks perbankan, keberadaan komisaris wanita terbukti dapat menurunkan kecenderungan pengambilan risiko dan memperbaiki kualitas pengawasan dewan (Gulamhussen & Santa, 2015; Setiawan & Khoirotunnisa, 2020).

Lebih lanjut, penelitian terkini tidak hanya memposisikan komisaris wanita sebagai determinan langsung risiko bank, tetapi juga sebagai variabel moderasi yang memengaruhi hubungan antara kinerja keuangan dan risiko (Abou-El-Sood, 2021; Nadeem et al., 2019). Komisaris wanita dipandang mampu memperkuat disiplin manajerial dan kualitas fungsi pengawasan dewan melalui pendekatan pengambilan keputusan yang lebih hati-hati, berorientasi pada pengendalian risiko, serta sensitif terhadap aspek etika dan keberlanjutan. Sejumlah studi menunjukkan bahwa keberadaan perempuan dalam dewan komisaris berkorelasi dengan tingkat

aversi risiko yang lebih tinggi dan kecenderungan untuk membatasi pengambilan risiko yang berlebihan dalam aktivitas perbankan (Abou-El-Sood, 2019; Gulamhussen & Santa, 2015). Dalam konteks ekspansi kredit, komisaris wanita diyakini mampu menahan dampak negatif pertumbuhan kredit yang agresif dengan memperkuat proses monitoring dan memastikan bahwa kebijakan penyaluran kredit tetap selaras dengan prinsip kehati-hatian (Abou-El-Sood, 2021; Birindelli et al., 2020).

Selain itu, dari perspektif permodalan, keberadaan komisaris wanita berpotensi memperkuat peran modal sebagai bantalan risiko (capital buffer) melalui dorongan terhadap kebijakan manajemen risiko yang lebih konservatif dan pengawasan yang lebih ketat terhadap kecukupan modal bank. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa dewan dengan keterwakilan perempuan cenderung lebih menekankan stabilitas jangka panjang dibandingkan pencapaian kinerja jangka pendek, sehingga mampu mengoptimalkan fungsi permodalan dalam menekan risiko kredit (Musah et al., 2022; Sghaier & Hamza, 2018). Dalam hal profitabilitas, komisaris wanita juga berperan memastikan bahwa peningkatan laba tidak dicapai melalui strategi pengambilan risiko yang berlebihan, melainkan melalui praktik pengelolaan kredit yang lebih berkualitas dan berkelanjutan (Nadeem et al., 2019; Othmani, 2021).

Namun demikian, bukti empiris mengenai peran moderasi komisaris wanita dalam hubungan antara pertumbuhan kredit, permodalan, dan profitabilitas terhadap risiko kredit masih menunjukkan hasil yang beragam dan sangat kontekstual. Beberapa studi menemukan bahwa keberadaan komisaris Wanita secara

signifikan memperlemah hubungan positif antara ekspansi kredit dan risiko bank, sementara studi lain menunjukkan bahwa efektivitas peran tersebut sangat bergantung pada karakteristik institusional, struktur kepemilikan, serta tingkat pengembangan sistem tata kelola di masing-masing negara (Abou-El-Sood, 2021; Gallucci et al., 2020). Inkonsistensi temuan ini mengindikasikan bahwa pengaruh komisararis wanita sebagai mekanisme tata kelola tidak bersifat universal, melainkan dipengaruhi oleh konteks spesifik perbankan, termasuk jenis bank dan lingkungan regulasi tempat bank tersebut beroperasi.

Dalam konteks Indonesia, khususnya pada Bank Pembangunan Daerah, penelitian mengenai risiko kredit masih didominasi oleh kajian faktor keuangan tradisional, sementara peran tata kelola berbasis gender sebagai mekanisme moderasi relatif belum banyak dieksplorasi. Padahal, struktur kepemilikan BPD yang didominasi oleh pemerintah daerah dan potensi intervensi non-komersial dalam kebijakan kredit menjadikan penguatan fungsi pengawasan dewan, termasuk melalui keberadaan komisararis wanita, sebagai isu yang sangat relevan.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kesenjangan penelitian yang jelas terkait pemahaman mengenai bagaimana pertumbuhan kredit, permodalan, dan profitabilitas memengaruhi risiko kredit BPD, serta sejauh mana komisararis wanita mampu memoderasi hubungan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan kredit, permodalan, dan profitabilitas terhadap risiko kredit Bank Pembangunan Daerah di Indonesia, dengan memasukkan komisararis wanita sebagai variabel moderasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan literatur risiko perbankan

dan tata kelola berbasis gender, serta kontribusi praktis bagi regulator, pemerintah daerah, dan manajemen BPD dalam memperkuat stabilitas dan keberlanjutan perbankan daerah.

1.2 Perumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, berikut rumusan masalah dalam penelitian ini:

- 1) Apakah pertumbuhan kredit berpengaruh signifikan terhadap risiko kredit pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia?
- 2) Apakah permodalan berpengaruh signifikan terhadap risiko kredit pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia?
- 3) Apakah profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap risiko kredit pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia?
- 4) Apakah komisaris wanita berpengaruh signifikan terhadap risiko kredit pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia?
- 5) Apakah komisaris wanita memoderasi pengaruh pertumbuhan kredit terhadap risiko kredit pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia?
- 6) Apakah komisaris wanita memoderasi pengaruh permodalan terhadap risiko kredit pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia?
- 7) Apakah komisaris wanita memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap risiko kredit pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan kredit terhadap risiko kredit pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia.
- 2) Untuk menganalisis pengaruh permodalan terhadap risiko kredit pada Bank Pemba
- 3) Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap risiko kredit pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia.
- 4) Untuk menganalisis pengaruh komisaris wanita terhadap risiko kredit pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia
- 5) Untuk menganalisis peran komisaris wanita dalam memoderasi pengaruh pertumbuhan kredit terhadap risiko kredit pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia.
- 6) Untuk menganalisis peran komisaris wanita dalam memoderasi pengaruh permodalan terhadap risiko kredit pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia.
- 7) Untuk menganalisis peran komisaris wanita dalam memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap risiko kredit pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan *Agency Theory* (Jensen & Meckling, 1976) dan *Resource Dependence Theory* (RDT) (Pfeffer & Salancik, 1978) dalam menjelaskan risiko kredit perbankan, khususnya pada Bank Pembangunan Daerah. Dari perspektif *Agency Theory*, penelitian ini

memperluas pemahaman mengenai peran mekanisme tata kelola dalam membatasi konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik yang dapat mendorong pertumbuhan kredit agresif, pemanfaatan modal yang tidak disiplin, dan pencapaian profitabilitas jangka pendek yang berisiko. Dengan memposisikan komisaris wanita sebagai variabel moderasi, penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pengawasan dewan—bukan sekadar keberadaannya—berperan penting dalam menekan risiko kredit. Dari perspektif RDT, penelitian ini menegaskan peran dewan komisaris sebagai penyedia sumber daya strategis, di mana keberadaan komisaris wanita dipahami sebagai sumber daya yang membawa perspektif kehati-hatian dan orientasi jangka panjang, sehingga memperkuat kemampuan bank dalam mengelola ekspansi kredit, mengoptimalkan permodalan, dan menjaga keberlanjutan profitabilitas.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Manajemen Bank BPD

Penelitian ini memberikan masukan praktis bagi manajemen Bank Pembangunan Daerah dalam merumuskan kebijakan pengelolaan risiko kredit yang lebih efektif dan berkelanjutan. Temuan mengenai pengaruh pertumbuhan kredit, permodalan, dan profitabilitas terhadap risiko kredit dapat digunakan oleh manajemen untuk menyeimbangkan strategi ekspansi kredit dengan kapasitas permodalan dan kemampuan pengendalian risiko. Selain itu, bukti empiris mengenai peran moderasi komisaris wanita dapat menjadi dasar bagi manajemen untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan dewan, khususnya

dalam mengendalikan risiko yang timbul dari pertumbuhan kredit yang agresif dan tekanan pencapaian laba. Dengan demikian, manajemen BPD dapat memperkuat disiplin manajerial, meningkatkan kualitas portofolio kredit, dan menjaga stabilitas kinerja keuangan bank dalam jangka panjang.

b) Bagi Pemerintah Daerah sebagai Pemilik Bank BPD

Bagi pemerintah daerah sebagai pemegang saham pengendali, penelitian ini memberikan landasan empiris dalam merancang kebijakan tata kelola Bank Pembangunan Daerah yang lebih efektif. Hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai acuan dalam penetapan komposisi dewan komisaris, khususnya dalam mendorong keterwakilan komisaris wanita yang kompeten dan independen untuk memperkuat fungsi pengawasan. Selain itu, temuan penelitian ini dapat membantu pemerintah daerah dalam menyeimbangkan mandat pembangunan daerah dengan prinsip kehati-hatian perbankan, sehingga intervensi kebijakan tidak meningkatkan risiko kredit secara berlebihan. Dengan tata kelola yang lebih kuat, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa BPD tetap berperan sebagai agen pembangunan daerah sekaligus lembaga keuangan yang sehat dan berkelanjutan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan. Penelitian ini dibuat dalam tiga bab, yang mana bab-bab tersebut berkaitan satu sama lainnya.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pembahasan secara ringkas mengenai latar belakang yang mendasari pemikiran atas penelitian, merumuskan masalah yang ada di dalam penelitian

tujuan dalam penelitian, manfaat dari penelitian dan sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai penelitian terdahulu yang pernah dilakukan secara teoritis oleh para peneliti sebelumnya dan berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti, kerangka konseptual serta hipotesis dari penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini meliputi rancangan penelitian, ruang lingkup penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi dan teknik pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data serta teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini meliputi deskripsi subjek penelitian dan variabel penelitian, hasil olah data yang telah dilakukan, apakah masing – masing variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, variabel mediasi mampu memediasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan variabel moderasi mampu memoderasi pengaruh variabel mediasi terhadap variabel dependen serta implikasi hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini meliputi kesimpulan mengenai hasil dari penelitian yang telah dilakukan ini, keterbatasan penelitian dan saran untuk peneliti selanjutnya.